

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan masih menjadi sasaran utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Zulyanto, 2022), Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam upaya mengatasi kemiskinan. Menurut Ferezagia (2018), “Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan”. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dinilai cukup berhasil menurunkan persentase penduduk miskin (Arifin, 2020), berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang (BPS, 2025).

Sejalan dengan penurunan kemiskinan secara nasional, kondisi serupa juga terjadi di Jawa Timur, Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2025 mencapai 3,876 juta orang, dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 17,94 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,50 persen, menurun 0,06 persen poin terhadap September 2024 (BPS Jawa timur, 2025). Kondisi tersebut juga tercermin pada tingkat kabupaten atau kota, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan dikenal sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup beragam akan tetapi Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Secara statistik, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyuwangi cenderung mengalami penurunan. kondisi tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui tabel tingkat kemiskinan di Banyuwangi berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, 2020 – 2025.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	130,37	8,06
2021	130,93	8,07
2022	122,01	7,51
2023	119,52	7,34
2024	106,61	6,54
2025	100,13	6,13

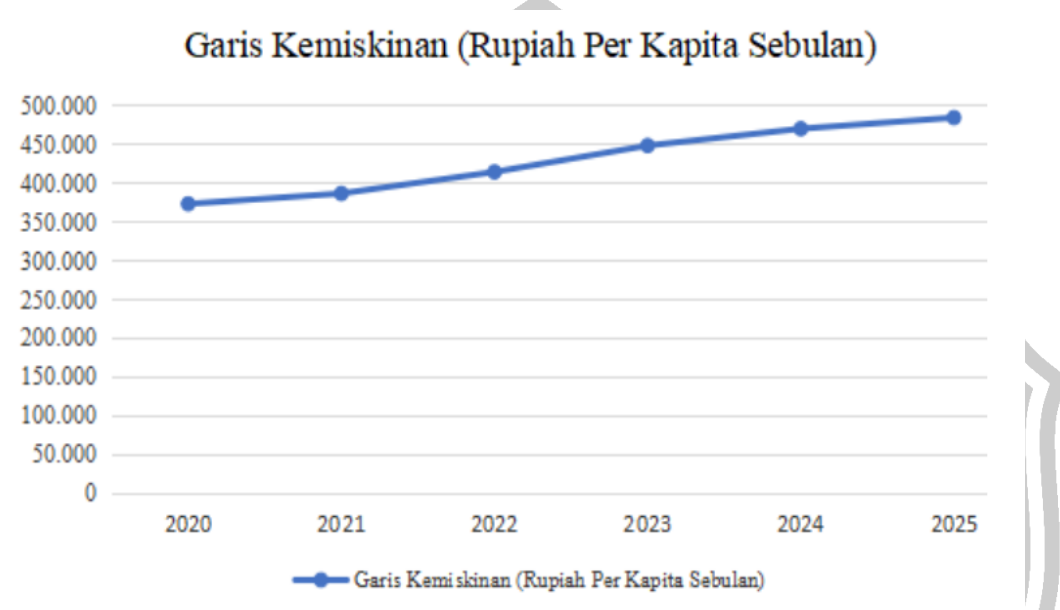
Sumber: Badan Pusat Statistik Banyuwangi (2025).

Berdasarkan data tersebut, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 130,37 ribu jiwa (8,06%) dan sempat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 130,93 ribu jiwa (8,07%), namun sejak tahun 2022 hingga 2025 terjadi penurunan yang konsisten, yaitu menjadi 122,01 ribu jiwa (7,51%) pada 2022, 119,52 ribu jiwa (7,34%) pada 2023, 106,61 ribu jiwa (6,54%) pada 2024, dan 100,13 ribu jiwa (6,13%) pada 2025.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena di sisi lain nilai garis kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2025), garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp485.012 per kapita per bulan. Aprilia & Sembiring (2021) menyatakan bahwa garis kemiskinan atau batas kemiskinan merupakan tingkat pendapatan minimum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mencapai standar hidup yang layak di suatu negara. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin, sedangkan yang berada di atasnya diklasifikasikan sebagai tidak miskin.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa standar kebutuhan minimum hidup masyarakat semakin tinggi, sehingga meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat tetap ada. Sejalan dengan

penelitian Abdillah *et al.* (2026), yang menyatakan bahwa “semakin tinggi pengeluaran per kapita di suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinan,” Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat masih cukup besar sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih komprehensif. kondisi tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui gambar tingkat Garis Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, 2020 – 2025 berikut.



Gambar 1. 1 Garis Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, 2020 – 2025.

(Sumber: Badan Pusat Statistik Banyuwangi, 2025)

Gambar tersebut menunjukkan tren peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi periode 2020–2025. Peningkatan ini mencerminkan naiknya kebutuhan minimum hidup masyarakat. Kenaikan relatif stabil pada 2020–2021, namun lebih signifikan pada 2022–2024, yang mengindikasikan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program PETI KOIN BERMANTRA (Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera), yang dirancang sebagai strategi inovatif dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Hamzah *et al.* (2024), bahwa PETI KOIN BERMANTRA merupakan program pemberdayaan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan melalui prinsip kolaborasi

dan inklusi, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program serta menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat, secara adil dan merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, dengan memanfaatkan pendekatan perantara pasar berbasis kluster sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Penyelenggaraan PETI KOIN BERMANTRA.

Program yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 ini merupakan pengembangan dari Anti Poverty Program (APP) sejak 2006, dengan penekanan pada pendekatan *market intermediation* dalam pengelolaan dan pemasaran produksi (Bappeda Banyuwangi, 2025). PETI KOIN BERMANTRA berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pelatihan, pendampingan usaha, penyediaan sarana produksi, serta penguatan akses pasar, sehingga mampu mendorong kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Program PETI KOIN BERMANTRA sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu pilar utama dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (Hamzah & Syalsadila, 2025), khususnya tujuan nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah yang menjadi target dalam penerapan program PETI KOIN BERMANTRA. Meskipun Banyuwangi dikenal memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), tetapi Pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan program di Kabupaten Banyuwangi berlangsung secara bertahap, dimulai sejak tahap APP dan berlanjut hingga implementasi Program PETI KOIN BERMANTRA, sasaran program ini adalah kelompok masyarakat miskin yang produktif dan bekerja di sektor pertanian (Pergub Jatim No 70 Tahun 2022).

Anggota Program PETI KOIN BERMANTRA adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat (pokmas) sebagai penerima bantuan. Berdasarkan data Kelompok Masyarakat (Pokmas) Program PETI KOIN BERMANTRA Kabupaten Banyuwangi periode 2021–2025, terdapat 13 kelompok

masyarakat dengan jumlah anggota sebanyak 151 orang yang tersebar di Kecamatan Srono, Muncar, dan Glenmore (Bappeda Banyuwangi, 2025). Setiap kelompok memiliki jumlah anggota serta jenis usaha ekonomi produktif yang berbeda-beda, dengan kisaran anggota antara empat hingga dua puluh orang, dan penetapannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam program.

Kecamatan Srono merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan bantuan program PETI KOIN BERMANATRA. Berdasarkan Pergup Jatim No 70 Tahun, (2022) bahwa Pemilihan dan penetapan lokasi PETI KOIN BERMANTRA dilaksanakan di kabupaten diutamakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data LPPD Kabupaten Banyuwangi Tahun, (2024) bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Kecamatan Srono tercatat sebesar Rp3,032 juta per kapita per tahun, yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Srono yang masih relatif rendah.

Kecamatan Srono ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program, yang tercermin dari jumlah Pokmas serta keterlibatan masyarakat dalam program. Karena kecamatan tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam setiap tahap kegiatan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Srono yang beragam juga menjadikan wilayah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena dapat menggambarkan bagaimana program dijalankan di tengah perbedaan tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, serta potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Srono, program ini diikuti oleh 7 kelompok masyarakat (pokmas) dengan jumlah 83 anggota, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat yang cukup luas dalam program tersebut.

Kecamatan Srono dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu kecamatan yang menerima bantuan program PETI KOIN BERMANATRA yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi akan tetapi dalam implementasinya, tidak seluruh anggota Pokmas mampu mengikuti program secara optimal, bahwa sebagian anggota mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan juga terdapat berbagai kendala struktural yang mengindikasikan

perlunya penguatan pelaksanaan program, antara lain kapasitas kelembagaan Pokmas yang masih memerlukan penguatan, kemitraan pasar yang belum sepenuhnya berkelanjutan dengan *off-taker* besar, akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal yang masih terbatas, keterbatasan pendanaan usaha, serta koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran multipihak meliputi pemerintah daerah, sektor swasta (*off-taker*), BUMDes, dan lembaga keuangan yang belum terintegrasi secara optimal (Bappeda, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, perlu dievaluasi secara sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Melalui evaluasi tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin produktif. Temuan evaluasi ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, dan
2. Untuk menganalisis perubahan pendapatan setelah terlibat dalam pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pelaksana serta pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan Program PETI KOIN BERMANTRA di Kabupaten Banyuwangi.
2. Bagi peneliti penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan analisis dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap konsep dan praktik evaluasi
3. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian atau kegiatan serupa di masa mendatang.

